

STUDI ATAS PRAKTIK AKUNTANSI DI ORGANISASI MASJID DI SURABAYA

Pepie Diptyana

STIE Perbanas Surabaya

pepiediptyana@yahoo.com, pepie@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Studies in accounting are important especially in any organization that deals with operation that spends money. In this emerging public sector, especially of accounting it is assumed that there are limited studies in nonprofit accounting, especially in religion organization. This research explores the process of accounting practice in mosque organization. There are some findings: first, accounting process is required by Al-Qur'an, so it is a mosque organization's obligation to report its resources use as an accountability practice, second, mosque organizations use cash basis to provide its financial report, third, financial report in mosque organization is a summary of cash bookkeeping.

Key words: *accounting, nonprofit accounting, accounting in mosques organization, cash basis*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kantor Departemen Agama kota Surabaya tahun 2009, terdapat 1.114 masjid di Surabaya. Data demografi penduduk Surabaya juga menunjukkan bahwa 80% persen penduduk Surabaya yang menganut agama Islam. Populasi ini menunjukkan potensi yang besar untuk memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara penggalangan dana maupun penyediaan fasilitas.

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nonlaba, yang mengelola sumberdaya untuk menjalankan aktivitas masjid. Kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu karena kebutuhan fasilitas peribadatan yang dekat dengan tempat tinggal atau tempat bekerja. Pengelolaan dan sumber daya diperoleh diperoleh secara sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid (ta'mir dan bendahara). Satu-satunya motivator bagi seorang ta'mir adalah mandat dari Al Qur'an.

Ada kecenderungan bahwa organisasi nonlaba (termasuk organisasi pengelola masjid) akan menjadi sorotan masyarakat.

Di Amerika, ada kecenderungan bahwa para donor ingin mengetahui seberapa besar peran bantuan uang mereka dalam membantu organisasi nonlaba. Dengan demikian organisasi tersebut harus menjelaskan kelayakan biaya, baik kelayakan biaya secara waktu atau nilai uang (Heffes 2005). Teori pensignalan (signaling theory) mampu menjelaskan perilaku manajemen yang berusaha mengungkapkan informasinya secara sukarela. Berdasarkan teori ini, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan organisasi meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan (Suwardjono 2005). Kredibilitas inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas yang dapat mempersempit kesenjangan informasi antara organisasi nonlaba dengan masyarakat.

Ada dua jenis organisasi nonlaba, yaitu pemerintahan dan nonpemerintah (Deddi, Iswahyudi and Maulidah 2007, Wilson and Kattelus 2004). Akuntansi untuk dua jenis organisasi ini di Indonesia telah diatur dengan standar yang berbeda. Akuntansi untuk pemerintahan, diatur dengan Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, yang menghendaki dual basis, yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, dan pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Sementara itu, akuntansi organisasi nonlaba selain pemerintahan diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. PSAK No. 45 menghendaki penerapan akuntansi akrual bagi organisasi nonlaba.

Telah banyak penelitian yang mengargumenkan kontroversi penerapan akuntansi di organisasi nonlaba (Cordery 2008, Nasi and Steccolini 2008, Lightbody 2001; Booth 1993). Jumlah penelitian di Indonesia mengenai praktik akuntansi di organisasi nonlaba ini masih terbatas. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa LSM, Parpol dan sekolah masih menggunakan basis kas (Anik 2007), namun belum melihat bagaimana akuntansi di organisasi keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi di organisasi nonlaba selain pemerintahan, khususnya di organisasi masjid. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa fakta mengenai praktik akuntansi di organisasi nonlaba dan memperluas hasil penelitian terdahulu.

RERANGKA TEORITIS

Masjid sebagai Organisasi Nirlaba

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) dan FASB (Financial Accounting Standards Board) mendefinisikan not-for-profit organization adalah entitas yang memiliki karakteristik sebagai berikut (1) sebagian besar sumberdaya organisasi tergantung pada penyedia sumberdaya yang tidak mengharapkan timbal balik / return, atau ikhlas menyumbangkan sumberdaya tanpa pamrih; (2) operasional organisasi adalah menyediakan barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan; (3) tidak ada ownership interest (kepentingan pemilik) seperti perusahaan bisnis. Pada perusahaan bisnis, perusahaan dimiliki oleh

investor. (Wilson and Kattelus 2002). Wilson and Kattelus (2002) menyatakan bahwa komunitas agama termasuk dalam independent sector of not-for-profit sector yang bebas dari pajak.

Akuntansi di Organisasi Nonlaba

Pilihan basis akuntansi untuk organisasi sektor publik ada 4, yaitu: (1) basis kas ; (2) basis kas modifikasian; (3) basis akrual ; dan (4) basis akrual modifikasian. Di Indonesia, praktik akuntansi sektor privat menggunakan metode akrual. Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menghendaki dual basis, yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, dan pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 menghendaki akuntansi di organisasi nonlaba menggunakan metode akrual (IAI 2007).

Menurut PSAK No. 45, laporan keuangan organisasi nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akun-akun diklasifikasikan dalam berdasarkan aset, pendapatan dan beban yang tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, serta kewajiban. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumberdaya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumberdaya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumberdaya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak

terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang (IAI 2007, par. 03 dan 05).

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa praktik akuntansi akrual tidak cocok untuk organisasi sektor publik Alasan mengapa organisasi nonlaba kurang tepat jika menggunakan metoda akrual adalah: (1) tujuan utama organisasi bukan laba, sehingga pencarian angka laba tidak relevan untuk pengukuran kinerja, (2) struktur financial dan solvency juga tidak relevan digunakan dalam lingkup organisasi sektor publik, (3) akuntansi akrual bukanlah ukuran outcome, (4) akuntansi akrual mempersempit fokus kinerja, semata-mata fokus pada cost of service dan efisiensi. (Ma and Matthews 1993; Guthrie and Johnson 1994; Lewis 1995; Guthrie 1998 dalam Nasi and Steccolini 2008).

Perdebatan mengenai metode akuntansi ini juga diungkapkan oleh Ives, et al. (2009). Basis akrual pada organisasi pemerintahan maupun nonlaba diterapkan ketika meretia melaporkan aktivitas yang bertipa bisnis. Untuk aktivitas yang sifatnya pemerintahan dasar, digunakan basis akuntansi dengan tipa-hibrid, yaitu modified accrual basis of accounting. Dengan basis ini, pengukuran dilakukan hanya untuk arus masuk (inflows) dan arus keluar (outflows) aktiva lancar yang finansial (financial current resources), tidak mengukur seluruh sumberdaya ekonomik. Walaupun demikian, Nasi and Steccolini (2008) membuktikan bahwa praktik akuntansi berbasis kas dan akuntansi komitmen lebih dapat diterima oleh para CFO (Chief Financial Officer) di organisasi sektor publik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Akuntansi

Pada kenyataannya, meskipun jenis organisasinya sama, akuntansi diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang mempengaruhi perbedaan praktik akuntansi antara lain : (1) sifat bisnis (nature of business), (2) budaya (culture), dan (3) ting-

kat pendidikan dan pengalaman akuntan (Chand, Patel and Day 2008). Di organisasi agama, khususnya di gereja, praktik akuntansi dipengaruhi oleh karisma dan kekuatan persuasi (persuasive power) dari: staf keuangan, sukarelawan yang menjadi anggota manajemen, staf manajemen yang berposisi sebagai penyelia atau pembawa misi (Lightbody 2001).

Sifat bisnis banyak dipengaruhi oleh kondisi negara. Jadi, meskipun memiliki standar akuntansi yang sama antar negara (biasanya karena standar yang disusun karena adopsi dari negara lain), namun karena kondisi negaranya berbeda dan mengakibatkan praktik bisnis juga menjadi berbeda, maka praktik akutansinya pun dapat berbeda.

Selain sifat bisnis, budaya (culture), juga berpengaruh terhadap praktik akuntansi di suatu negara, pengaruh ini juga berlaku pada budaya organisasi. Budaya merupakan simbolisasi dari shared values and beliefs yang mempengaruhi keputusan individual (Patel 2003). Pada kondisi budaya yang menekankan pada kemandirian, maka organisasi akan membuat suatu manual yang detail untuk keperluan interpretasi dan mengaplikasikan praktik akuntansi. Sementara itu, pada kondisi budaya yang "melayani", seperti pada wilayah Pasifik Selatan, maka kantor pusat atau organisasi yang lebih tinggi perlu memonitor dan melayani kebutuhan kantor cabang, atau organisasi yang lebih rendah. Dua bentuk budaya tersebut berdampak pada bentuk pilihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbeda, pelatihan atau pendampingan.

Jika tingkat pendidikan dan pengalaman akuntansi para akuntan di suatu negara adalah rendah, maka akuntan di negara tersebut tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan keputusan yang baik (Chand, Patel and Day 2008). Sebagaimana makna akuntansi menurut Suwardjono (2005), maka argumen tersebut juga berlaku di tingkat organisasi. Tingkat pendidikan dan pengalaman akuntan pada suatu organisasi dapat berpengaruh

terhadap kemampuan untuk membuat accounting judgement. Untuk memperbaiki kemanfaatan informasi akuntansi secara keseluruhan, maka harus ada inisiatif untuk menentukan tingkat pendidikan akuntan dan mengadakan pelatihan (Perera 1989).

Proposisi pada penelitian ini adalah: terdapat penerapan akuntansi di organisasi masjid sebagai bentuk akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskusi focus group dan wawancara. Metode focus group merupakan metode diskusi yang terdiri dari 7 – 10 orang, atau 4 – 12 orang dalam sebuah forum yang dipimpin oleh seorang moderator (peneliti) (Kruger, 1988 dalam Marshall and Rossman 2006). Moderator harus berperan sebagai sosok yang objektif dalam membahas masalah yang didiskusikan. Metode focus group ini merupakan cara yang tepat untuk mempelajari pandangan dan opini, serta menggali ide-ide kompleks, serta untuk memahami suatu fenomena melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman secara mendalam. Pendekatan focus group memungkinkan partisipan dapat memberi masukan kepada peneliti. Di samping focus group, peneliti juga melakukan wawancara untuk melengkapi keterbatasan metode focus group, yakni adanya perasaan enggan untuk mengutarakan sesuatu karena banyaknya orang yang hadir dalam focus group. Dengan wawancara, bias yang muncul akibat dominasi beberapa anggota focus group dapat dihindari. Selain focus group dan wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi atas laporan keuangan yayasan masjid.

Anggota diskusi focus group adalah responden/informan yang dipilih untuk memberikan informasi adalah bendahara, ketua ta'mir masjid dan perwakilan dari kantor Departemen Agama. Bendahara masjid dipilih dengan pertimbangan bahwa ia mampu menjelaskan metode pencatatan dan pengungkapan. Ta'mir masjid juga dilibatkan untuk menjelaskan kesesuaian antara pen-

gungkapan dengan kebutuhan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan masjid.

Persiapan pengumpulan responden/informan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: (1) meminta data demografi masjid diperoleh dari Kantor Departemen Agama Kota Surabaya, (2) berdasarkan data demografi masjid, responden/informan representatif yayasan/manajemen pengelola masjid dipilih secara random, (3) mendatangi ta'mir dan menanyakan kesediaannya untuk hadir sebagai peserta focus group.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara: pertama, mengumpulkan data mengenai kesediaan responden/informan; kedua, mengumpulkan dokumentasi laporan keuangan/kinerja masjid; ketiga, melaksanakan focus group dan wawancara. Forum diskusi dilakukan dengan cara mengundang dan mengumpulkan responden/informan pada suatu forum diseminasi/pelatihan.

Rangkaian kegiatan diskusi focus group adalah sebagai berikut : (1)perkenalan, meliputi : penyampaian salam, tujuan kegiatan, perkenalan dengan peneliti, perkenalan para peserta focus group. Pada sesi perkenalan ini diperoleh data peserta, seperti latar belakang pendidikan, asal yayasan masjid, lamanya peserta terlibat sebagai ketua ta'mir atau bendahara, jumlah jamaah yang dilayani, garis besar sejarah pendirian yayasan masjid; (2)penjelasan mengenai bentuk dan arah diskusi; (3) penyampaian topik diskusi, yaitu: mengapa menyajikan laporan keuangan, bagaimana proses penyusunan laporan keuangan --- mulai dari dasar pencatatan, penjumlahan, sampai dengan penyajian laporan keuangan, menanyakan manfaat dan kendala yang dihadapi ketika menerapkan akuntansi. (4)merumuskan ringkasan hasil diskusi / wawancara. Selain diskusi dengan focus group, juga dilakukan wawancara dengan rangkaian kegiatan yang sama dengan diskusi focus group.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Responden/Informan
Data dari Kantor Departemen Agama Kota

Surabaya menunjukkan populasi sebesar 1.114 masjid di Surabaya. Data yang ada adalah nama, alamat, nomor telpon. Terdapat data nama ta'mir, tetapi tidak lengkap. Sampel dipilih secara simple random dan dihubungi untuk diminta kesediaannya sebagai responden/informan.

Hasil penyampelan dan konfirmasi ada 30 orang yang bersedia menjadi responden/informan sebagai representasi dari 16 masjid dan satu orang dari Kantor Departemen Agama. Enam belas masjid ini merupakan masjid yang didirikan murni swadaya masyarakat, bukan didirikan oleh pengembang perumahan sebagai fasilitas dari pengembang, atau bagian dari fasilitas sekolah/kantor, bukan pula bagian dari pekerjaan pemerintah daerah. Dari 30 orang tersebut, dibentuk focus group. Jumlah ini memang cukup banyak untuk focus group. Ini disebabkan karena peserta yang semula menyatakan tidak dapat bergabung ternyata hadir. Oleh karena itu, diskusi focus group dilengkapi dengan metode wawancara agar dapat mengatasi keterbatasan pendekatan focus group.

Para responden/informan ini, baik dari masjid maupun dari kantor Departemen Agama, memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Namun sebagian besar tidak berlatarbelakang pendidikan ekonomi. Hanya ada 3 orang yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi. Selain itu, jenjang pendidikan universitas ditempuh oleh 11 orang peserta di tingkat akademi dan S1. Walaupun demikian, lamanya mereka menjadi ta'mir cukup beragam, dari 1 tahun sampai dengan 22 tahun (rata-rata: 6 tahun).

Gambaran pendapatan infaq per bulan, masjid anggota focus group, pada waktu normal, di luar pendapatan ketika hari besar, tampak pada Tabel 1.

Ada dua masjid yang bernama Jenderal Sudirman, keduanya tidak terkait. Masjid Jendral Sudirman pada nomor 15 adalah masjid yang didirikan di dalam area kompleks perumahan, sedangkan masjid Jendral Sudirman pada nomor 3 adalah masjid di lokasi umum. Masjid-masjid lain selain masjid Jenderal Sudirman adalah masjid yang berada di luar area perumahan/perkantoran/sekolah.

Tabel 1
Masjid Peserta Diskusi Focus Group

no	nama masjid	Jumlah jama'ah rata-rata per bulan (orang)	Pendapatan rata-rata per bulan (Rp)
1	Baitul Mukminin	126	15.700.000
2	Ummul Mu'minin	250	15.000.000
3	Jendral Sudirman	1000	15.000.000
4	Husnul Khotimah	2500	10.000.000
5	Muhammad Cheng Ho	1000	10.000.000
6	Al Muslimun	100	8.000.000
7	Tholabuddin	700	7.800.000
8	Al-Huda	120	5.750.000
9	Al-Hasan	1000	5.000.000
10	Istiqbal	150	3.000.000
11	Darussalam	100	3.000.000
12	Al Khoiroh	130	2.500.000
13	Nurul Jannah	1000	2.000.000
14	Baitul Mukmin	70	1.125.000
15	Jendral Sudirman	300	1.000.000
16	Baitul Taqwa	400	800.000
17	Al-Achmad	90	600.000

Praktik Akuntansi di Organisasi Masjid

Berdasarkan data laporan keuangan yang dikumpulkan dari para anggota focus group menunjukkan bahwa semua masjid yang menjadi sumber data pada penelitian ini telah membuat laporan keuangan. Laporan tersebut dibuat setiap bulan oleh bendahara, dan ditandatangani ketua ta'mir, didistribusikan atau dipublikasikan ke donatur dan jamaah.

Alasan organisasi pengelola masjid menyajikan laporan keuangan adalah : (1) tuntutan dari agama, (2) pengambilan keputusan penggunaan dana oleh manajemen (ta'mir) yang membutuhkan informasi keuangan, dan (3) permintaan donatur. Tuntutan dari agama dijelaskan oleh surat Al Baqarah ayat 282, yang berbunyi *"hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."* Muamalah dapat diartikan dengan transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Dengan demikian, aktivitas penyerahan dana dari penderma/donatur kepada pengelola dapat disebut dengan transaksi, karena dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu, baik untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan umat para pengguna masjid, dan dana ini membutuhkan akuntabilitas dari pengelolanya. Al Baqarah 282 tersebut juga dapat dimaknakan pentingnya pencatatan secara double entry, dari sisi penerima dana dan pemberi dana. Alasan kedua dan ketiga

relevan dengan tujuan pelaporan keuangan di sektor privat, yakni pelaporan keuangan ditujukan untuk pihak eksternal dan internal organisasi. Sama dengan tujuan di sektor privat, laporan keuangan di organisasi pengelola masjid juga disajikan untuk pengambilan keputusan alokasi sumberdaya, dan menginformasikan perubahan atas sumberdaya.

Istilah akuntansi, menurut pengelola masjid adalah pencatatan transaksi uang. Persepsi ini mengakibatkan bentuk "laporan keuangan" yayasan berupa ringkasan dari buku kas, atau buku kas yang diformat menjadi "laporan kas". Ada beberapa masjid yang menyalin buku kas menjadi format laporan karena jumlah transaksi yang sedikit. Laporan keuangannya disajikan dalam bentuk laporan (single step), terdiri dari Penerimaan, Pengeluaran, dan Surplus/Defisit. Sebelum komponen Penerimaan, terdapat Saldo Awal Kas, dan angka Surplus/Defisit ini menunjukkan jumlah atau saldo kas. Jika ada alokasi penggunaan untuk surplus kas, maka terdapat akun Alokasi Biaya (dalam akuntansi pemerintahan, ini digambarkan dalam akun Pembiayaan). Aktiva tetap, daftar hutang piutang, ada dalam catatan yang terpisah. Secara ringkas, tampilan struktur laporan keuangan masjid ada pada Gambar 1.

Pelaporan dilakukan secara periodik, mulai mingguan sampai dengan tahunan. Untuk laporan mingguan, masjid membuat laporan saldo kas mingguan terpampang di papan masjid setiap hari Jum'at pada saat Jum'atan. Laporan Bulanan dan Tahunan dibuat dalam bentuk formal. Laporan bulanan dan tahunan didistribusikan ke donatur dalam bentuk majalah atau buletin, atau edaran, dan kepada ketua yayasan dan pengelola gedung.

Pencatatan transaksi pendapatan (penerimaan uang masuk) dan biaya (uang keluar) dilakukan secara kronologis dan rinci. Pendapatan (di Gambar 1 – Struktur Laporan Keuangan Masjid di kolom Penerimaan) berasal dari infaq, baik dari kotak jumatatan,

Gambar 1
Struktur Laporan Keuangan Masjid

Laporan Keuangan
Ta'mir Masjid XXX
Periode tanggal

Tgl	Penerimaan	Rp	Saldo Awal	Tgl	Pengeluaran	Rp	Keterangan
	Jumlah				Jumlah		
	Saldo						

Ta'mir Masjid XXX

Nama dan Tandatangan Ketua

kotak amal masjid, kotak amal di rumah-rumah warga, infaq parkir, dan segala bentuk penerimaan uang lainnya seperti penerimaan dari infaq kontribusi fasilitas tempat dari Taman Pendidikan Al-Qur'an, klinik, Taman Kanak-kanak. Bukti pendapatan di masing-masing masjid anggota focus group beragam; mulai dari kupon, tanda terima, bukti catat dan serah terima pengambilan kotak amal warga. Biaya, Bukti pengeluaran kas berupa berupa kwitansi atau nota.

Pencatatan pendapatan dan biaya dilakukan secara double entry (dengan akun lawan Kas) oleh bendahara. Pengelompokan akun yang ada hanya 2, yaitu Pendapatan (penerimaan kas) dan Biaya (pengeluaran kas). Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan bukti-bukti. Nama akun biaya sangat beragam karena diringkas dari bunyi kwitansi atau nota. Kolom Penerimaan diisi dengan sumber atau asal uang masuk. Jika diterima dari donatur, maka dicatat sebagai "infaq donatur". Jika diterima dari kotak amal, maka kolom Penerimaan dicatat sebagai "infaq kotak amal", atau jika penerimaan dari kotak warga di rumah, dicatat sebagai "infaq kotak warga". Pada beberapa masjid, "Infaq Donatur" mencantumkan nama donaturnya sampai dengan Laporan Keuangan terbit. Isi kolom Biaya (Pengeluaran) sesuai dengan apa yang tercantum di bukti transaksi atau sesuai dengan nama aktivitasnya. Jika bukti pengeluaran terjadi untuk membeli dop lampu, dan

Nama dan Tandatangan Bendahara

menerima bon pembelian dop lampu, maka di kolom Biaya (Pengeluaran) akan dicatat berupa "dop lampu" atau "membeli dop lampu". Jika biaya (pengeluaran) karena membayar pengganti transport khotib, maka akan dicatat sebagai "pengganti transport khotib". Hampir sama dengan pencatatan donasi, pengeluaran yang bersifat reward atau honor, maka ada masjid yang tidak mencantumkan nama penerima, dan ada yang mencantumkan. Bagian akhir laporan adalah Saldo Kas yang menunjukkan sisa kas pada akhir periode tertentu. Laporan ini ditandatangani oleh bendahara dan ketua ta'mir.

Media pencatatan ada dua, yaitu manual dan terkomputerisasi. Masjid Ummul Mu'minin menggunakan software pencatatan yang mengharuskan data untuk masuk secara kronologis, sehingga setiap transaksi harus segera di-entry. Software tersebut berbasis MsExcel, dirancang oleh salah satu anggota remaja masjid. Masjid Cheng Ho juga menggunakan komputer berbasis MsExcel. Semua masjid menyimpan bukti keluar dan masuknya uang. Pada beberapa masjid, bukti-bukti dilampirkan pada setiap pelaporan keuangan, kecuali pelaporan keuangan ke donatur. Tidak dilampirkannya bukti di pelaporan keuangan ini adalah pertimbangan kepraktisan.

Laporan keuangan disajikan di media bulletin, majalah, atau edaran rutin. Bagi masjid yang memuat laporan keuangan di

media bulletin atau majalah, laporan keuangan disajikan bersama-sama dengan berita tentang kegiatan masjid. Komentar menarik dari ta'mir masjid Jendral Sudirman adalah "setelah kami memberikan edaran rutin berisi laporan keuangan, penerimaan donatur kami meningkat sekitar 30%".

Pada pencatatan sampai dengan penyajian laporan keuangan tidak ada penggunaan istilah dan klasifikasi seperti PSAK No. 45 (pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumbangan terikat, sumbangan tidak terikat). Walaupun tidak tersajikan dalam laporan keuangan, anggota focus group mampu menentukan mana saja akun yang termasuk sumbangan terikat, tidak terikat, atau yang permanen. Seluruh anggota focus group menyatakan bahwa format laporan keuangan masjid telah diterapkan sejak masjid berdiri, dan disesuaikan dengan bentuk informasi yang dapat dipahami oleh ketua yayasan, ketua ta'mir, dan para donatur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil diskusi focus group dan wawancara, ditemukan bahwa terdapat penerapan akuntansi di organisasi masjid sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana publik. Bagi organisasi masjid, akuntabilitas adalah kewajiban yang sakral karena ada aturan agama yang mewajibkannya.

Pelaporan keuangan organisasi masjid disajikan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas. Format laporan keuangan berupa ringkasan pembukuan harian penerimaan dan pengeluaran kas, yang pada outputnya berupa angka surplus dan defisit. Angka surplus dan defisit ini menunjukkan saldo kas karena keputusan alokasi sumberdaya oleh stakeholders masih didominasi dengan ketersediaan kas. Hasil ini mendukung argumen Monsen (2002), Olson, Humphrey and Guthrie (2001) dan Nasi & Steccolini (2008).

Walaupun akuntansi diwajibkan secara sakral dan organisasi masjid telah berupaya untuk menyajikan laporan keuangan, namun demikian praktik akuntansi di organisasi masjid masih beragam. Pengungkapan yang

dilakukan secara sukarela dan beragamnya kebutuhan informasi para pengguna dapat menjadi penyebab adanya keragaman ini. Keterbatasan pada penelitian ini adalah belum digali lebih lanjut mengenai keterkaitan antara basis akuntansi dan format pelaporan keuangan yang digunakan dengan tingkat pemahaman stakeholders organisasi masjid. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Anik, Nugrohowati, 2007, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Organisasi Sektor Publik di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Agustus Vol. 8 No. 2, 2007, pp. 1560 - 1571.
- Booth, Peter, 1993, Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 6 No. 4, 1993, pp. 37 - 67.
- Chand, Parmod, Patel, Chris and Day, Ronald, 2008, Factors Causing Differences in The Financial Reporting Practices in Selected South Pasific Countries in The Post-Convergence Period. *Asian Academy of Management Journal*, July Vol. 3 No. 2, 2008, pp. 111-129.
- Cordery, Carolyn, 2008, Reporting Performance in The Not-for-Profit Sector, *Chatered Accountants Journal*. December 2008, p. 46.
- Deddi, Noordiawan, Iswahyudi, Sondi Putra and Maulidah, Rahmawati, 2007, *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Heffes, Ellen M, 2005, Will Non-Profit Next Focus of Sarbanex-Oxley? *Financial Executive*. October Vol 21 Issue 8, 2005, pp. 18-19.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat, 2007.
- Lightbody, Margaret, 2001, Accounting and Accountant in Church Organization: A Critical Reflection, 2001,
- Marshall, Catherine and Rossman, B.

- Gretchen, 2006, *Designing Qualitative Research*,. California : Sage Publications, Inc., 2006.
- Monsen, N 2002, The Case for Cameral Accounting, *Financial Accountability and Management*, 18 1, 2002, pp. 39-72.
- Nasi, Greta and Steccolini, Ileana, 2008, Implementation of Accounting Reform, *Public Management Review*. Vol. 10 Issue 2, 2008, pp. 175-196.
- Olson, O., Humphrey, C. and Guthrie, J 2001, Caught in An Evaluatory Trap: A Dilemma For Public Services under New Public Financial Management, *European Accounting Review*, 10 3, 2001, pp. 505-522.
- Perera, M. H. B. 1989. Toward a Framework to Analyze The Impact of Culture on Accounting. *International Journal of Accounting Education and Research*. 1 (1) 1989, pp. 42-56.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi: Perakayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta : BPFE, 2005.
- Wilson, Earl R. and Kattelus, Susan C 2004, *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities, 13th Edition*, New York : McGraw-Hill, 2004.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami haturkan kepada:

1. Yth. Direktorat Jenderal Dikti yang telah mendanai Program Ipteks sehingga memungkinkan peneliti untuk mengundang dan melakukan pendekatan focus group dan wawancara.
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya beserta Bapak Suba'i dan Bapak Mohammad Ghofar (staf kantor Departemen Agama) yang berkenan menyediakan informasi mengenai kondisi populasi.
3. Yth. Ibu Nurul H.U. Dewi, SE., Ak., M.Si, yang telah memberikan komentar dan saran saat penulis menyusun artikel ini
4. Rekan-rekan mahasiswa yang membantu untuk memfasilitasi diskusi dan wawancara selama penelitian ini berlangsung